

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Chaedar Alwasilah, 2008, *Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum & Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung
- Achmad Dodi Haryadi (ed), 2012, *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta
- Afan Gaffar, 2000, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Andrew Reynolds, dkk, 2005, *Electoral System Design; The New International IDEA Handbook*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance)
- Ari Pradhanawati, 2005, *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*, Konsorium, Surakarta
- A.V. Dicey, 1971, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Introduction by E.C.S. Wade, 10 edn, London
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normaif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, R. Grafindo, Jakarta
- Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda (ed), 1982, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty*, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta
- Didik Supriyanto, 2007, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Peludem, Jakarta
- Djauhari, 2008, *Konsepsi Negara Hukum Konstitusi Demokrasi dan Kedaulatan*, Unissula Press, Semarang

- Eddy Purnama, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media, Malang
- Eman Hermawan, 2001, *Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar*, LKIS, Yogyakarta
- Frans Magnis Suseno, 1997, *Mencari Sosok Demokrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2001, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin, 2009, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*, Yogyakarta
- HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Irfan Fahrudin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Jimly Assidique, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Van Hoeve, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta
- Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Koejaraningrat, 1993, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Banyumedia Publishing, Malang
- M. Arizar, 1998, *Metode Penelitian*, Galia Indonesia, Jakarta

- M. Gaffar Janedri, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta
- Melvin I Urafsky, 2002, *Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi*, Buletin Demokrasi, Jakarta
- Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan Sinar Bakti, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1998, *Pengantar HTN Indonesia*, Pusat Study HTN, Fakultas Hukum UI, CV. Sinar Bakti, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 1993, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gema Media, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta
- Muchsan, 2002, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesi Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Idrus, 2007, *Metode Penulisan Ilmu-ilmu Sosial*, UII Press, Yk
- Muhammad Tahir Azhary, 2007, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mukhtie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang

- Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta
- Nur Hdayat Sardini, 2009, *Pedoman Pengawas Pemilu Elections-MDP*, Jakarta
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta
- O. Setiawan Dj, R. Widya, 2001, *Pedoman Penulisan Skripsi, Thesis, Disertasi*, Bandung
- Oemar Senoadji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta
- Padmo Wahyono, 1984, Beberapa Teori Ketatanegaraan Prof. Djokosoetono, SH dalam *Guru Pinandita: Sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, SH*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada, Yogyakarta
- Rasjidi, 2001, *Koreksi Terhadap Drs. Nurcholis Madjid tentang Sekularisme*, Bulan Bintang, Jakarta
- R.H. Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rozali Abdullah, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas Pemilu Legislatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Saifullah Ma'shum, 2001, *KPU dan Kontroversi Pemilu 1999*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta
- Samsul Wahidin, 2008, *Aspek Hukum Pemerintahan Daerah*, Laksbang Mediatama, Jakarta
- Satjipto Wirosardjono, 1995, *Dialog dengan Kekuasaan, Esai-esai tentang Agama, Negara, dan Rakyat*, Mizan, Bandung
- SF. Marbun, dkk, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

- Sigit Pamungkas, 2001, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, ...*, Jakarta
- Sondang P. Siagian, 1989, *Filsafat Administrasi*, Haji Masagung, Jakarta
- Sri Soemantri Martosoewignjo, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung
- Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung
- Sugiyono, 2007, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Keduabelas, Alfabeta, Bandung
- Sujanto, 1994, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sunarayati Hartono, 1976, *Apakah the Rule of Law*, Alumni, Bandung
- Supriyanto, 2005, *Peraturan Pemilihan Kepala Daerah*, Pustaka Mina, Jakarta
- Sutrisno, 1969, *Metodologi Reserch Jilid II*, UGM, Yogyakarta
- Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Mizan Publika, Jakarta
- Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta
- Toto Prandoyo S., 1992, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945 Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Liberty, Cet I, Yogyakarta
- Yan Pramandya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka, Semarang

## **B. Tesis/ Makalah/Buku Laporan/Buku Saku/Media Cetak**

### 1. Tesis

Abdul Muklis, 2009, *Politik Uang dan Demokrasi di Indonesia, Studi Kasus dalam Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Periode*. Tesis pada jurusan Ilmu Politik pada FISIP Universitas Air Langga Surabaya

Agus Zulkifli, 2009, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial*, Tesis Fakultas Hukum, Unissula Semarang.

Damanik, Febiola, Fifi, 2015, *Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi Kasus : Panwaslu Kota Meda)*, Medan, Universitas Sumatera Utara

Suwanda, 2009, *Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi di Kabupaten Demak)*, Tesis Fakultas Hukum, Unissula Semarang

### 2. Makalah

Mochtar Maso'ed, 2002, Makalah disampaikan dalam Semnar dan Lokakarya Nasional Evaluasi Kritis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945, Keluarga Alumni UGM, Yogyakarta

### 3. Buku Laporan

Khoirul Saleh, 2015, *Buku Saku Pedoman Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2015*, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak, Demak

Nur Salim, 2014, *Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum*, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Jepara

### 4. Buku Saku

Abhan, 2013, *Buku Pedoman Pengawasan Pemilu Kada*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Semarang

### 5. Media Cetak

Suara Merdeka

## **C. Internet**

[demokrasipancasilaindonesia.blogspot.com](http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.com)>, tanggal 1 Februari 2016, pukul 13.00 WIB

diah restuning maharani, *teori kewenangan*, <file:///D:/konsep/teori-kewenangan.html>... tanggal 2 Februari 2016, pukul 10.10 WIB

egafebi.blogspot.co.id, tanggal 1 Februari 2016, pukul 13.45 WIB

googlewebligt.com/?lite\_url, mengantisipasi kecurangan Pilkada 2015, tanggal 1 Desember 2015, pukul 10.00 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewa>,,,, tanggal 2 Februari 2016, pukul 09.20 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewa>..., tanggal 2 Februari 2016, pukul 08.15 WIB

<http://kpu-jategprov.go.id/blog/2016/01/26/hasil-putusan-gugatan-pilkada-jateng-2015>, tanggal 2 Februari 2016, pukul 11.00 WIB

<http://www.jurnalparlemen.com/view/5258/sistem-proporsional-terbuka-tetap-diterapkan-apa-masalahnya.html>, tanggal 2 Februari 2016, pukul 13.12 WIB

<http://www.rumahpemilu.org/read/3351/Gamabaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>, tanggal 2 Februari 2016, pukul 10.15 WIB

jagosejarah.blogspot.com>Demokrasi, tanggal 1 Februari 2016, pukul 14.10 WIB

sentananews.com., tanggal 1 Desember 2015, pukul 11.00 WIB

[www.negarahukum.com>hukum](http://www.negarahukum.com/hukum)>teoripengawasan, tanggal 10 Februari 2016, pukul 10.30 WIB

[www.pengertianpakar.com](http://www.pengertianpakar.com), tanggal 1 Februari 2016, pukul 13.25 WIB

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

##### 1. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD LN Tahun 2003 Nomor 37 TLN Nomor 4277

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPD LN Tahun 2008 Nomor 51, TLN Nomor 4836

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Bawaslu

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Bupati

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015 Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara



Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota

3. Peraturan KPU

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuthakiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

4. Peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP:  
Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum